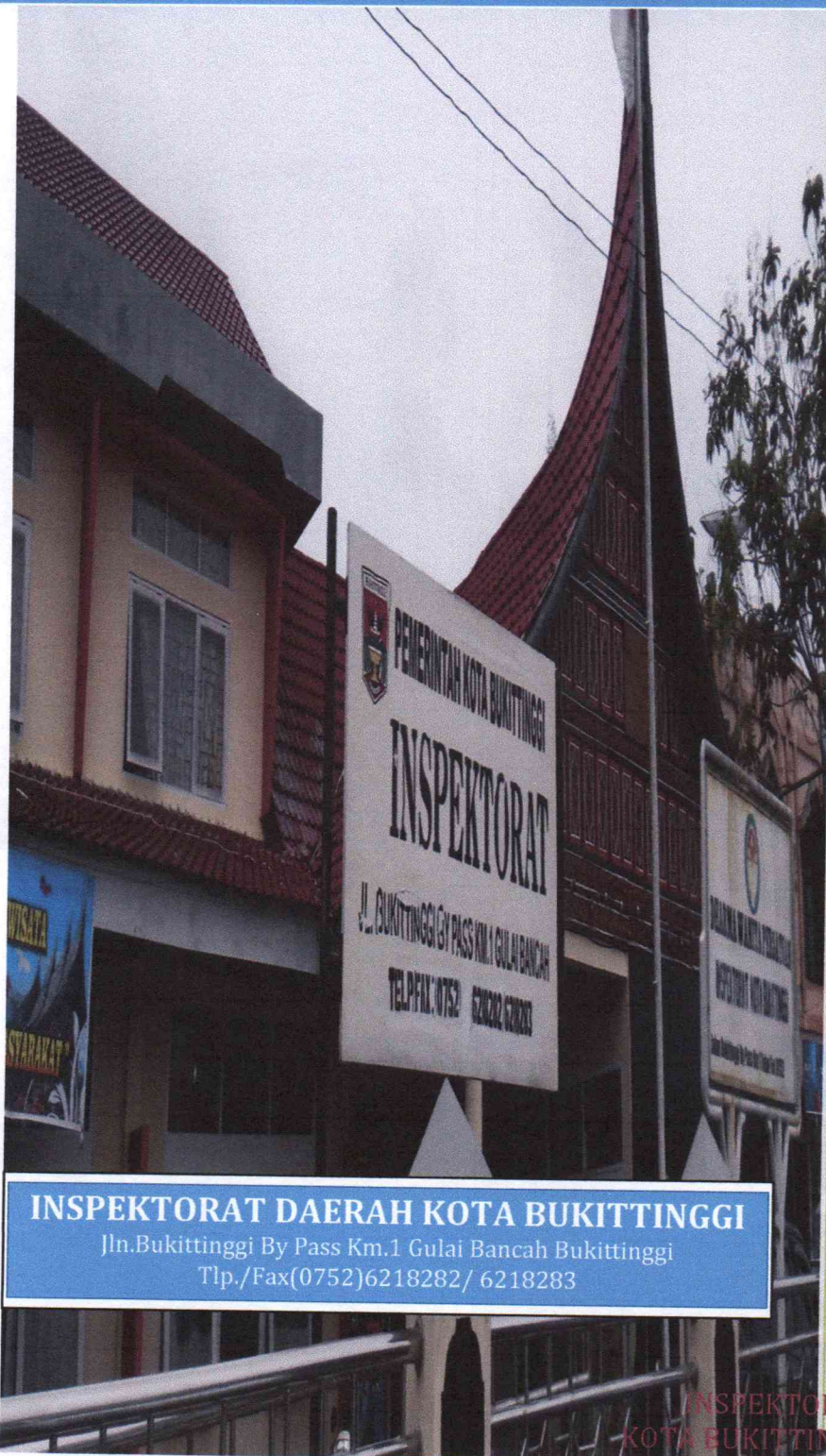


RENCANA KERJA (RENJA) INSPEKTORAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Jln. Bukittinggi By Pass Km.1 Gulai Bancah Bukittinggi
Tlp./Fax(0752)6218282/ 6218283

INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah yang berkeadilan dan demokratis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan pengejawantahan dari tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas, dan kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah, perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah yang berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
 8. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.**

19/11

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang meliputi:
 - a. bab I mengenai pendahuluan;
 - b. bab II mengenai hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2022;
 - c. bab III mengenai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV mengenai rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - e. bab V mengenai penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. dinas kebakaran dan penyelamatan;
 - f. satuan polisi pamong praja;
 - g. badan penanggulangan bencana daerah;
 - h. dinas sosial;
 - i. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - j. dinas lingkungan hidup;
 - k. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

- l. dinas perhubungan;
 - m. dinas komunikasi dan informatika;
 - n. dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
 - o. dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
 - p. dinas pemuda dan olahraga;
 - q. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - r. dinas pariwisata;
 - s. dinas pertanian dan pangan;
 - t. dinas perdagangan dan perindustrian;
 - u. sekretariat daerah;
 - v. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - w. badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
 - x. badan keuangan;
 - y. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - z. inspektorat daerah;
 - aa. kecamatan mandiangan koto selayan;
 - bb. kecamatan guguk panjang;
 - cc. kecamatan aur birugo tigo baleh; dan
 - dd. badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

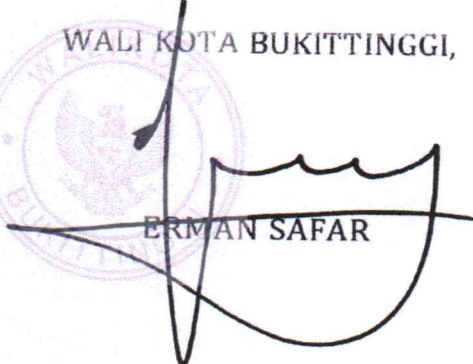
- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

WALI KOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat, karunia dan izin-Nya, dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 disusun berdasarkan pertimbangan dan analisa perkembangan serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan mendesak, yang diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024 serta mendukung tercapainya visi dan misi Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Demikian dokumen ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Bukittinggi, 2023



ELVINA KARTIKA ESYA, SE.Akt, MM

Pembina Tk.I - IV/b

NIP. 198103252005012008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	32
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelaahan Usaha Program dan Kegiatan Masyarakat.....	45
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	47
3.3 Program dan Kegiatan.....	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	54
BAB V PENUTUP.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kinerja.....	6
Tabel 2.2 (T-C.29)	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022.....	18
Tabel 2.3 (T-C.30)	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.....	31
Tabel 2.4 (T-C.31)	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bukittinggi.....	36
Tabel 2.5 (T-C.32)	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Bukittinggi.....	45
Tabel 3.1	Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024.....	49
Tabel 4.1 (T-C.33)	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dan merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah melakukan Penyusunan Rancangan Awal RKPD dimana salah satu cakupannya adalah Penelaahan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.

Guna memenuhi tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi maka disusunlah Renja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 dengan mengacu kepada Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 dan juga mempertimbangkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Di dalam rancangan awal Rencana Kerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahun 2024 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Program dan Kegiatan serta target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2024. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja.

Dasar pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi, yaitu:

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021 – 2026;
3. Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi tahun 2021 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2024;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2024;
3. Sebagai acuan penyusunan RKA tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Penyusunan Renja, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Inspektorat, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat

Penyusunan perencanaan kinerja tahun 2024 dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan kinerja 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022. Dalam bab ini akan dipaparkan capaian kinerja Inspektorat tahun 2022 dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan. Dalam pelaksanaan program tersebut diuraikan dalam kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Kinerja

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
A. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masukan : Dana Yang dibutuhkan	Rp.	386.700.000	326.964.329	84,55%
	Keluaran : Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	Orang	37	37	100%
Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Realisasi anggaran belum maksimal karena adanya efisiensi biaya.					
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Masukan : Dana Yang dibutuhkan	Rp.	29.437.000	24.929.590	84,69%
	Keluaran : Jumlah bimtek yang dilaksanakan	Kali	7	7	100%
Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, Realisasi anggaran belum maksimal karena adanya efisiensi biaya.					

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
B. Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	2.345.000	1.845.000	78,68%
	Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	item	9	9	100%
Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, realisasi anggaran belum maksimal karena adanya efisiensi biaya.					
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	90.900.000	82.486.382	90,74%
	Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	100%
Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.					
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	20.012.000	19.593.000	97,91%

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
	<p>Keluaran : Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan</p> <p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.</p>	item	20	20	100%
5.	<p>Masukan : Dana yang dibutuhkan</p> <p>Keluaran : Jumlah barang tercetak Jumlah lembar tergandakan</p> <p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.</p>	Rp.	14.594.000 2 38.376	14.285.400 2 36.833	97,89% 98,00%
6.	<p>Masukan : Dana yang dibutuhkan</p> <p>Keluaran : Jumlah tamu yang dilayani</p> <p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, capaian kinerja dan realisasi anggaran rendah karena menurunnya jumlah kunjungan di akhir tahun sementara dana telah ditambahkan di anggaran perubahan.</p>	Rp. Orang	12.300.000 300	7.423.300 210	60,35% 70,00%

Program/Kegiatan dan SubKegiatan

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<p>Masukan : Dana yang dibutuhkan</p> <p>Keluaran : Jumlah makanan dan minuman harian/lembur tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat/pertemuan/diklat/tamu/kegiatan tersedia Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya yang dihadiri</p>	Rp.	197.775.000	187.411.571	94,76%
	Porsi	Porsi	150	150	100%
	Porsi	Porsi	300	300	
	%	%	100	100	

Problem dan Solusi :

Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.

C. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Mebel	<p>Masukan : Dana yang dibutuhkan</p> <p>Keluaran : Jumlah paket mebel yang disediakan</p>	Rp.	111.750.000	57.403.650	51,37%
	paket	paket	1	2	100%

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, realisasi anggaran belum maksimal karena adanya efisiensi.</p>				
D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				
	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	1.380.000	953.000	69,06%
	Keluaran : Jumlah materai,perangko, buku cek, benda pos lainnya yang tersedia	Item	1	1	100%
	Persentase pengiriman paket	%	100	100	
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala, serapan anggaran kurang dikarenakan penurunan jumlah paket untuk dikirim.</p>				
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				
	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	35.220.000	33.459.107	95,00%
	Keluaran : Jumlah tagihan internet, listrik, telepon yang dibayarkan	Bulan	12	12	100%
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.</p>				

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	39.190.000	36.882.492	94,11%
	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1	1	100%
	Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.				
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	75.400.000	72.047.000	95,55%
	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	unit	7	7	100%
	Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.				
3. Pemeliharaan Mebel	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	3.200.000	1.126.000	35,19%
	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Mebel	paket	1	1	100%

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Serapan anggaran sesuai kebutuhan.</p>				
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	13.110.000	6.247.500	47,65%
	Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	17	17	100%
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Serapan anggaran sesuai kebutuhan.</p>				
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	204.137.936	198.596.300	97,29%
	Keluaran : Jasa kebersihan yang dibayar Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli Perbaikan / penggantian bagian kantor yang rusak.	Paket Item paket	1 7 1	1 7 1	100%
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.</p>				

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
A. Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	123.354.000	105.039.001	85,15%
	Keluaran : Jumlah laporan evaluasi Pelayanan Publik	Laporan	1	1	100%
	Jumlah laporan evaluasi SAKIP	laporan	28	28	100%
	Jumlah laporan evaluasi SPIP	laporan	4	2	50%
	Jumlah laporan evaluasi ZI-WBK	laporan	1	4	400%
Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Realisasi anggaran belum maksimal karena adanya efisiensi biaya.					
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	84.901.600	55.357.850	65,20%
	Keluaran : laporan hasil pengawasan regular	laporan	70	63	90,00%
	laporan hasil review DAK	laporan	28	31	111%
	laporan review dokumen perencanaan dan penganggaran	laporan	6	6	100%

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
	laporan review penyerapan anggaran laporan review perencanaan penganggaran responsif gender	laporan laporan	4 4	4 4	100% 100%
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Serapan anggaran kurang dikarenakan efisiensi biaya.</p>				
3.	Reviu Laporan Kinerja				
	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	3.630.000	2.784.250	76,70%
	Keluaran : Jumlah laporan hasil reviu kinerja	laporan	2	2	100%
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Serapan anggaran kurang dikarenakan efisiensi biaya.</p>				
4.	Reviu Laporan Keuangan				
	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	56.838.000	48.439.108	85,22%
	Keluaran : Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	laporan	1	1	100%
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.</p>				

Program/Kegiatan dan SubKegiatan

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
5. Kerjasama Pengawasan Internal	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	131.467.000	101.860.903	77,48%
	Keluaran : Jumlah kerjasama dengan APH	kerjasama	1	1	100%
	Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Serapan anggaran kurang dikarenakan efisiensi biaya.				
6. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	71.827.000	64.333.931	89,57%
	Keluaran : Jumlah laporan pemantauan TLHP	laporan	12	12	100%
	Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.				
B. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					
1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	31.428.000	25.904.150	82,42%
	Keluaran : Jumlah laporan TPKD	laporan	2	3	150%

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
	<p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala.</p>				
2.	<p>Masukan : Dana yang dibutuhkan</p> <p>Keluaran : Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/ penanganan pengaduan</p> <p>Problem dan Solusi : Kegiatan terlaksana dengan baik, serapan anggaran kurang dikarenakan efisiensi biaya.</p>	Rp.	12.330.000	7.454.500	60,46%
		laporan	10	9	90%
<p>III. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</p> <p>A. Pendampingan dan Asistensi</p>					
1.	<p>Masukan : Dana yang dibutuhkan</p> <p>Keluaran : Jumlah laporan penilaian RB</p> <p>Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Serapan anggaran kurang dikarenakan efisiensi biaya.</p>	Rp.	16.321.000	13.113.780	80,35%
		laporan	1	1	100%

Program/Kegiatan dan SubKegiatan					
Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian	Realisasi	% Pencapaian
2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	78.030.000	56.442.799	72,33%
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Jumlah laporan UPG	Laporan laporan	4 2	4 2	100%
3. PendampinganAsistensi dan Verifikasi Pencegahan Integritas	Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Serapan anggaran kurang karena kegiatan secara zoom sehingga dana yang sudah disiapkan untuk kegiatan tatap muka tidak terealisasi.				
	Masukan : Dana yang dibutuhkan	Rp.	94.359.600	67.309.350	71,33%
	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Survei Pencegahan Integritas	laporan	1	1	100%
	Problem dan Solusi : Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Serapan anggaran kurang dikarenakan efisiensi biaya.				

Selanjutnya akan disampaikan Rekapitulasi evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inpektorat s/d Tahun 2022 Kota Bukittinggi dalam tabel 2.2 (T-C.29). sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T-C.29).

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11=(10/9)
06	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
06.01	Inspektorat Daerah									
06.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
06.01.01.1.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	43 orang	100%	100%	100%			
06.01.01.1.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	40 orang	43 orang	37 orang	37 orang	100%	40 orang/bulan	40 orang/bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11=(10/9)
06.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%			
06.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	40 orang	5 orang	37 orang	37 orang	100%	40 orang		
06.01.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimtek yang dilaksanakan	4 kali	4 kali	5 kali	7 kali	140%	40 orang		
06.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Admin-istrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%	100%	100%			
06.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 item	7 item	9 item	9 item	100%	1 paket		
06.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 jenis	5 jenis	3 paket	3 paket	100%	1 paket		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11=(10/9)
06.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terbeli	17 item	5 jenis	17 item	20 item	118%	4 paket		
06.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1000 buah 4000 lembar	1000 buah 35338 lembar	5 item 38376 lembar	2 item 36833 lembar	68%	7 paket		
06.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	235 orang	360 orang	225 orang	210 orang	93%	50	10	20%
06.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	Laporan	Laporan	
06.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase makanan dan minuman lembur tersedia, Persentase makanan dan minuman rapat/ pertemuan/diklat/tamu/ kegiatan tersedia,	100%	100%	100%	100%	100%	100	25	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Program Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
06.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		100%	100%	100%			
06.01.01.1.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase rapat-rapat koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan perjalanan dinas lainnya yang dihadiri						3 unit		
06.01.01.1.07.05	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan baru								
06.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%	100%			
		Jumlah paket mebel yang disediakan						3 paket	2 paket	67%
		Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektoria Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022		Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektoria tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)
06.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai, perangko, buku cek, benda pos lainnya yang terbeli, Persentase pengiriman paket .	2 item 100%	2 item 100%	1 item 100%	1 item 100%	2 laporan	1 laporan	50%
06.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, internet dan listrik yang dibayarkan	12 bulan/rekening 100%	12 bulan/rekening	12 bulan	12 bulan	12 laporan	3 laporan	25%
06.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Kondisi Layak Pakai	100%		100%	100%			
06.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11=(10/9)
06.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	7 unit	7 unit	7 unit	100%	10 unit		
06.01.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	50 unit		
06.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16 item	16 item	17 unit	17 unit	100%	50 unit	12 unit	24%
06.01.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa kebersihan yang dibayar. Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang terbeli. Perbaikan/penggantian bagian kantor yang rusak.	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	90%	1 unit		
					10 item	7 item				
					1 paket	1 paket				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10/9)
06.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	32%	33,9%	25%	39,29%	8 (7/6)	9	10	11=(10/9)
06.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT	100%		100%	100%	100%			
06.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan evaluasi SAKIP	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	28 Laporan	162%	31 laporan		
		Laporan Evaluasi Pelayanan Publik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan				
		Laporan Evaluasi SPIP	28 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	2 Laporan				
		Laporan Evaluasi ZIWBK	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	4 Laporan				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
06.01.02.1.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan hasil pengawasan reguler	70	59	70	63	100%	99	37	37%
			15	27	28	31		laporan	laporan	
			6	7	6	6		laporan	laporan	
			12	8	4	4		laporan	laporan	
06.01.02.1.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Laporan review perencanaan dan penganggaran	4	4	4	4				
			2	2	2	2	100%	2	2	100%
06.01.02.1.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu kinerja pemerintah daerah	1	1	1	1				
			1	1	1	1	100%	1	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11=(10/9)
6.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan : Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kerjasama dengan APH	1		1	1	100%	1 kesepakatan		
06.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah laporan pemantauan TLHP	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	2 dokumen		
06.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelesaian penanganan kasus khusus	100%		100%	100%	100%			
06.01.02.1.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan TPKD (insidental)	6 laporan	5 laporan	2 laporan	3 laporan	150%	2 laporan		
06.01.02.1.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus/ penanganan pengaduan (insidental)	20 laporan	20 laporan	20 laporan	9 laporan	45%	20 laporan		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Program Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
06.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi	100%		100%	100%	100%			
		Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100%		100%	100%	100%			
06.01.03.2.02	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase pemberian pendampingan dan asistensi kepada OPD	100%		100%	100%	100%			
6.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penjaminan Kualitas penilaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1 laporan					28 perangat daerah		
		Bimtek Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	1 kali							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11=(10/9)
		Jumlah laporan Penjaminan Kualitas penilaian manajemen resiko	1 laporan							
		Bimtek manajemen resiko	1 kali							
		Jumlah laporan Penjaminan Kualitas penilaian efektivitas pengendalian Korupsi	1 laporan							
		Bimtek penilaian efektivitas pengendalian Korupsi	1 kali							
06.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan penilaian RB terpenuhi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	10		
		Laporan Penilaian ZI WBK	1 laporan					perang- kat daerah		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Inspektora t Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Inspektora t tahun 2023)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10	11=(10/9)
06.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Jumlah laporan UPG.	4 laporan MCP 4 laporan UPG	4 laporan MCP 4 laporan UPG	4 laporan MCP 2 laporan UPG	4 laporan MCP 2 laporan UPG	100%	2 kegiatan		
06.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Hasil Survei Penegakan Integritas	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	8 perang- kat daerah		

Capaian Kinerja atas pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah pada tingkat output. Berdasarkan pengkajian terhadap situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar, maka permasalahan yang dihadapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Program dan Keegiatannya pada tahun 2022 dapat diidentifikasi, namun permasalahan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah tidak ada terkait dengan standar pelayanan minimal (SPM) sehingga pada Sub bab ini Inspektorat Daerah hanya dapat menyajikan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat sesuai dengan Tabel 2.3 (T-C.30).

Tabel 2.3 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Catatan Analisis		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Integritas Pemerintah Daerah			75	76	76	77	77	78		77,49					
2	Nilai Hasil Survey Pegakan Integritas			70	71	72	73	74	75	78,3	77,49					
3	Skor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP			3	3	3	3	3	3	3	3,505					
4	Persentase SKPD yang Bebas Temuan dari Lem- baga Pengawasan Internal dan Eksternal			25%	29%	29%	32%	32%	36%	33,93%	39,29%					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, Inspektorat Daerah melakukan kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi :

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
2. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Kegiatan penunjang pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Daerah telah menjalankan kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap seluruh Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Sekretariat Dewan, Kantor, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Sekolah-sekolah dan UPTD). Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, kapabilitas maupun integritasnya.
2. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh pimpinan Unit Kerja secara cepat, tepat dan tuntas sebagai umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.
3. Sistem pengendalian intern belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
4. Dukungan anggaran untuk melaksanakan pengawasan masih belum memadai.
5. Masih kurangnya tenaga pemeriksa (Auditor + PPUPD) untuk melakukan kegiatan pengawasan dan tenaga administrasi.

Hal tersebut di atas akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dimana untuk pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Inspektorat Daerah menetapkan Visinya yaitu Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dengan pelaksanaan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang bertugas melakukan kegiatan dengan tujuan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan Rencana dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku sehingga hasil pengawasan ini dapat digunakan oleh pimpinan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang.

Sehingga untuk meningkatkan pelayanan, Inspektorat Daerah perlu mengkaji situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam maupun dari luar Inspektorat Daerah yang berdampak pada kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pembangunan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Kepala Daerah tersebut antara lain :

Faktor Penghambat :

1. Belum maksimalnya dukungan dana pada Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi.
2. Struktur Organisasi dengan Type C, mengakibatkan beban tugas pada jabatan struktural semakin berat.
3. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindaklanjuti oleh Pimpinan Unit Kerja secara cepat, tepat dan tuntas.
4. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.

Faktor pendorong :

1. Adanya komitmen Kepala Daerah dengan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk mencapai tingkat maturitas SPIP Pemerintah Kota Bukittinggi di Level 3
2. Adanya dukungan dari masyarakat dengan melaporkan berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.
3. Adanya kesempatan bergabung dalam organisasi Profesi.
4. Adanya kerjasama yang baik dengan Lembaga Pengawasan baik Internal maupun Eksternal.

Tantangan dan peluang untuk pengembangan pelayanan Perangkat Daerah 5 tahun mendatang sebagai hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi adalah sebagai berikut :

Tantangan :

1. Adanya Tuntutan Nasional untuk Tingkat Maturitas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten/Kota minimal berada pada level 3.

2. Adanya Tuntutan Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) minimal level 3 untuk Kabupaten/Kota.
3. Adanya tuntutan Nasional untuk percepatan pencapaian Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah.
4. Banyaknya pengaduan Masyarakat terkait Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
5. Adanya tuntutan Nasional untuk menciptakan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
6. Adanya tuntutan terhadap APIP (Inspektorat Daerah) sebagai Quality Assurance (Penjamin Mutu) dalam pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan.
7. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK merupakan salah satu Indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peluang :

1. Adanya Fasilitasi dan Asistensi dari BPKP untuk mencapai Tingkat Maturitas SPIP di Level 3 dan Peningkatan Kapabilitas APIP
2. Adanya Fasilitasi dan Asistensi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta KPK untuk percepatan Pencapaian Reformasi Birokrasi dan menciptakan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
3. Adanya peluang untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas kepada APIP.
4. Adanya komitmen Pemerintah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.
5. Adanya dukungan dari masyarakat dengan melaporkan berbagai bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan fungsi Aparatur Pengawas Internal Pemerintah Daerah diidentifikasi isu-isu yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah yaitu pemberdayaan APIP dengan memberikan prioritas meningkatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk :

1. Peningkatan frekuensi kegiatan pengawasan
2. Peningkatan kapasitas APIP
3. Pengembangan wawasan
4. Melengkapi sarana dan prasarana dan lainnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

RKPD tahun 2024 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebahagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024, namun nomenklatur kegiatan tersebut akan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2021–2026. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang dirumuskan pada Renstra Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2021–2026 merupakan program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4 (T-C.31) sebagai berikut :

Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Bukittinggi

Nama perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				7.415.797.396	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				7.648.300.041	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	6.199.772.932	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	6.191.269.471	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bukittinggi	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40 Orang/ bulan	6.199.772.932	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bukittinggi	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ bulan	6.191.269.471	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	431.400.667	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bukittinggi	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	487.499.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Cata- tan pen- ting
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	407.226.973	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	433.386.500	
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	24.173.694	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39 Orang	54.112.700	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bukit-tinggi	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	290.651.988	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bukit-tinggi	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	388.726.800	
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukit-tinggi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang disediakan	1 paket	5.053.223	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bukit-tinggi	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.494.100	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	25.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	170.797.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Cata- tan pen- ting
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	22.942.901	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	24.979.800	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	16.510.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	20.557.400	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	6.260.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 laporan	35.547.600	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	214.385.864	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	131.350.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bukit-tinggi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	42.411.906	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bukit-tinggi	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	51.685.000	
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1.524.186	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1.465.000	

Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan							
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Cata- tan pen- ting
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40.887.720	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	50.220.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bukit-tinggi	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kondisi Layak Pakai	100%	451.559.903	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bukit-tinggi	Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kondisi Layak Pakai	100%	432.212.570	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	44.030.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	66.158.170	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	11 unit	200.338.573	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	11 unit	86.950.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Cata- tan pen- ting
13	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dan Perizinannya			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Perizinannya			
14	Pemeliharaan Mebel	Kota Bukit- tinggi	Jumlah Mebel yang dipelihara	50 unit	3.455.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Bukit- tinggi	Jumlah Mebel yang dipelihara	50 unit	4.000.000	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukit- tinggi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	13.343.130	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bukit- tinggi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit	12.380.000	
16	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukit- tinggi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	190.393.200	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bukit- tinggi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	262.724.400	
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PENGAWASAN	Kota Bukit- tinggi	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	32%	1.186.581.401	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Kota Bukit- tinggi	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	32%	795.329.870	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bukit- tinggi	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT	100%	1.149.392.303	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Bukit- tinggi	Persentase pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT	100%	659.915.870	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
17	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	58 laporan	223.809.808	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	31 laporan	169.154.770	
18	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	107 laporan	648.422.015	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	99 laporan	223.583.000	
19	Reviu Laporan Kinerja	Kota Bukittinggi	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	2 laporan	34.212.514	Reviu Laporan Kinerja	Kota Bukittinggi	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	2 laporan	23.298.200	
20	Reviu Laporan Keuangan	Kota Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	24.650.197	Reviu Laporan Keuangan	Kota Bukittinggi	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 laporan	70.640.800	
21	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Bukittinggi	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 kesepakatan	145.330.355	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kota Bukittinggi	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk	1 kesepakatan	117.799.700	
22	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	2 dokumen	72.967.414	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak	Kota Bukittinggi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	2 dokumen	55.439.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
22	Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bukit-tinggi	Persentase penyelesaian penanganan kasus khusus	100%	37.189.098	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bukit-tinggi	Persentase penyelesaian penanganan kasus khusus	100%	135.414.000	
23	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 laporan	21.359.412	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6 laporan	52.820.100	
24	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 laporan	15.829.686	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 laporan	82.593.900	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Bukit-tinggi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi dan Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100%	507.826.657	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kota Bukit-tinggi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi dan Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	100%	459.338.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan penting	
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp.)
	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bukit-tinggi	Persentase pemberian pendampingan dan asistensi kepada OPD	100%	507.826.657	Pendampingan dan Asistensi	Kota Bukit-tinggi	Persentase pemberian pendampingan dan asistensi kepada OPD	100%	459.338.900	
25	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	243.625.920	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	30 perangkat daerah	286.634.000	
26	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	76.719.096	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	20.644.600	
27	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kegiatan	73.129.716	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bukit-tinggi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 kegiatan	72.304.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
28	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Bukit- tinggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	114.351.925	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Bukit- tinggi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	8 perangkat daerah	79.756.000	
JUMLAH					9.110.205.454					8.902.968.811	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Provinsi dan Nasional. Hasil dari Musrenbang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD). Pada saat kegiatan ini, usulan program dan kegiatan masyarakat dibahas dan ditelaah secara bersama oleh pelaku pembangunan guna :

- Menyelaraskan prioritas kegiatan pembangunan tahun 2024 yang berasal dari Kecamatan dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024.
- Menyesuaikan prioritas pembangunan (Renja) tahun 2024 dengan plafon/pagu dana Perangkat Daerah yang termuat dalam prioritas kegiatan pembangunan daerah (Rancangan RKPD Kota Bukittinggi Tahun 2024)
- Mengidentifikasi efektifitas berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, terutama untuk mendukung terlaksanannya Renja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024. Dengan demikian diharapkan rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran, prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pandangan dana APBD, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam rancangan Renja Perangkat Daerah disusun menurut Kecamatan dan Kelurahan.

Namun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan tidak ada yang terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan Tabel 2.5 (T-C.32) berikut :

Tabel 2.5 (T-C.32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Bukittinggi

Nama Perangkat Daerah : **Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
			Nihil		

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk menyusun Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pasal 86 huruf a Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah memberikan kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan asas-asas pemerintahan dengan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan, kekhususan, memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah serta partisipasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut memerlukan pengawasan agar selalu berada dalam koridor pencapaian tujuan otonomi daerah. Kebijakan pengawasan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan
3. Meningkatkan penjaminan mutu (quality insurance) atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan meliputi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan dan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan *Good Governance* (Pemerintahan yang baik) yang menjadi tuntutan di dalam tantangan yang mengglobal dewasa ini, peran Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi selaku lembaga pengawas menjadi sangat penting dalam upaya menekan terjadinya praktek-praktek KKN. Keberhasilan Inspektorat Daerah dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan sangat ditopang dengan fungsi dari aspek manajemen pengawasan dan pengendalian program/kegiatan sebagai salah satu unsur manajemen yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam perwujudan dan implementasi dari tugas pokok dan fungsi yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024 sesuai dengan Tujuan Renstra Inspektorat tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih”

Untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti keseluruhan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Bukittinggi, maka ditetapkanlah sasaran Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Daerah dan sepenuhnya mendukung pencapaian Sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Efektifitas Pencegahan Korupsi;
- 2) Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 3) Meningkatnya Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD).

3.3 Program dan Kegiatan

Renja ini merupakan rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2024 dan sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2024. Agar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapannya maka kaidahnya sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan yang dimuat dalam Renja Inspektorat Daerah ini masih bersifat indikatif yang akan diseleksi kembali sesuai prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran.
2. Perlu sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
3. Untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melakukan pemantuan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program.

Pada tahun 2024, dalam Renja Inspektorat Daerah terdapat 3 program, 8 kegiatan dan 28 subkegiatan untuk menyelenggarakan fungsi pendukung yang berdasarkan kepada visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah.

Untuk lebih lengkapnya program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024 adalah seperti berikut :

Tabel 3.1 Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih	1. Meningkatkan Efektifitas Pencegahan Korupsi	Nilai Hasil Survey Penegakan Integritas (Skala 0-100)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
						2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
						3. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
		2. Meningkatkan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Pendampingan dan Asistensi dalam upaya Peningkatan Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	4. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
		3. Meningkatkan Efektifitas Kinerja Pemerintah Daerah (Pelaksanaan Tugas OPD)	Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
						6. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah
						7. Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
						8. Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
						9. Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang terbentuk
						10. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	11. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 12. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	14. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
						15. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	16. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
						17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
						18. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan
						19. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan
						20. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
						21. Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		23. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah-Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak-Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
						25. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
						26. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara
						27. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara
						28. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan dikemukakan rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2024 yang meliputi Program dan Kegiatan tahun 2024 dan Perkiraan maju tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1 (T-C.33).

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025**

Kode	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Cata tan Pent ing	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6									
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
	INSPEKTORAT DAERAH								
01					9.415.306.581			11.368.030.186	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
6 01 01					8.162.259.981			9.642.433.964	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
6 01 01 2.02					6.401.127.081			8.389.374.110	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bukittinggi	47 orang/bulan	6.401.127.081		40 orang/bulan	8.389.374.110	
6 01 01 2.05					650.999.800			454.028.680	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
6 01 01 2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bukittinggi	47 orang	596.000.000		40 orang	429.371.512	

Kode	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Bukittinggi	47 orang	54.999.800	APBD		40 orang	24.657.168
6 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				545.773.700	APBD			296.129.628
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kota Bukittinggi	1 paket	5.032.100	APBD		1 paket	5.154.287
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kota Bukittinggi	2 paket	298.499.700	APBD		2 paket	26.010.000
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kota Bukittinggi	2 paket	31.193.300	APBD		4 paket	23.401.759

Kode				Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025	
6	01	01	05			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Bukittinggi	2 paket	20.000.000	APBD	7 paket	16.510.000
6	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Bukittinggi	50 laporan	34.998.600	APBD	50 laporan	6.380.000
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara- an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bukittinggi	50 laporan	156.050.000	APBD	50 laporan	218.673.582
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.085.000	APBD		43.260.144
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bukittinggi	2 laporan	1.465.000	APBD	2 laporan	1.554.670

Kode		Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025		
6	01			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
6	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kota Bukittinggi	12 laporan	52.620.000	APBD	12 laporan	41.705.474
6	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				510.274.400	APBD		459.641.402
6	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bukittinggi	1 unit	71.690.000	APBD	1 unit	44.030.000
6	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bukittinggi	11 unit	138.500.000	APBD	11 unit	204.345.345

Kode		Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						
6	01	01	05	05	50 unit	4.000.000	APBD	50 unit	3.455.000
6	01	01	06	06	50 unit	24.510.000	APBD	50 unit	13.609.993
6	01	01	09	09	1 unit	271.574.400	APBD	1 unit	194.201.064
6	01	02				816.203.300	APBD		1.210.313.033
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					
6	01	02				672.846.400	APBD		1.172.380.153
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal					
6	01	02	01	01	58 Laporan	159.006.400	APBD	58 Laporan	228.286.004

Kode				Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025			
6	01	02	2.01			02	03	04	06		07	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Bukittinggi	150 Laporan	223.583.000	APBD		107 Laporan	661.390.460	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Bukittinggi	2 Laporan	26.298.200	APBD		2 Laporan	34.896.764	
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Bukittinggi	1 Laporan	70.640.800	APBD		1 Laporan	25.143.201	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Bukittinggi	1 Kesepakan	117.799.700	APBD		1 Kesepakan	148.236.962	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Bukittinggi	2 Dokumen	75.518.300	APBD		2 Dokumen	74.426.762	

Kode	Uraian	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Cata tan Pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				143.356.900	APBD			37.932.880
6 01 02 2.02	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	Kota Bukittinggi	6 laporan	76.932.200	APBD		6 laporan	21.786.600
6 01 02 2.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Kota Bukittinggi	20 laporan	66.424.700	APBD		20 laporan	16.146.280
6 01 03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				436.843.300	APBD			515.283.159
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi				436.843.300	APBD			515.283.159
6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bukittinggi	30 perangkat daerah	264.138.400	APBD		30 perangkat daerah	245.798.438

Kode	Uraian	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2024				Catan pent ing	Perkiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Bukittinggi	10 perangkat daerah	20.644.600	APBD		10 perangkat daerah	78.253.478
6 01 03 2.02 03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Bukittinggi	2 Kegiatan	72.304.300	APBD		2 Kegiatan	74.592.310
6 01 03 2.02 04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kota Bukittinggi	8 perangkat daerah	79.756.000	APBD		8 perangkat daerah	116.638.963

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini disusun dan diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pengawasan tahun 2024.


Program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Kerja Inspektorat Daerah ini masih bersifat indikatif yang akan diseleksi kembali sesuai prioritas pembangunan dan ketersediaan anggaran serta memerlukan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, Kepala Perangkat Daerah diwajibkan melakukan pemantuan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kekurangan serta kelemahannya.

Kiranya Rencana kerja ini akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan pembangunan Kota Bukittinggi. Mohon maaf jika terdapat segala kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian Rencana Kerja ini.

WALIKOTA BUKITTINGGI


ERMAN SAFAR